



New Normal...

"Konsep *new normal* seperti apa yang akan diterapkan?" kata Suparwanti.

Sultan menambahkan tahap kedua adalah *timing*, yaitu menentukan waktu kapan suatu daerah dapat memulai aktivitas sosial dan ekonominya.

Tahapan ini, kata Sultan, harus memperhatikan data epidemiologi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan, kesiapan organisasi dan manajemen di daerah serta memastikan kesiapan fasilitas pelayanan kesehatan.

Tahap ketiga adalah prioritas, yakni proses memilih daerah atau sektor yang sudah boleh melakukan kegiatan sosial dan ekonomi secara bertahap. Dalam tahapan ini harus dilakukan simulasi untuk memastikan kegiatan tersebut dapat berkelanjutan.

Kemudian, kata Sultan, tahap keempat adalah koordinasi pusat dan daerah. Di sini dilakukan proses koordinasi timbal balik pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan terkait penerapan *new normal*. Tahap kelima adalah tahap *monitoring* dan evaluasi dari pelaksanaan pemulihan aktivitas sosial ekonomi itu sendiri.

"*Starting point* menuju *new normal*, ada pada tahapan prakondisi, di mana pemerintah bersama pihak terkait akan melakukan sosialisasi, publikasi dan edukasi kepada masyarakat tentang apa, bagaimana, kapan, dan siapa saja yang terlibat dalam melaksanakan *new normal*," ujar ayah lima putri ini.

Menurut Sultan, sosialisasi dan edukasi akan dilaksanakan dengan berbagai cara dan berbagai media. Pemda DIY akan melibatkan

instansi pemerintah dan mitra potensial untuk mengedukasi masyarakat. Sekolah, perguruan tinggi, kader posyandu, kader PKK, ormas, akan dilibatkan untuk ini. "Metode sosialisasi juga akan kami tentukan dengan meninjau data epidemiologi tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan," katanya.

Masyarakat harus mulai benar-benar sadar pentingnya melaksanakan protokol kesehatan, menerapkan gaya hidup sehat, dan saling berbagi informasi positif kepada orang-orang di sekitarnya. Sukses tidaknya rencana implementasi *new normal* tergantung pada kesadaran masyarakat.

Pertanyaan kedua datang dari akun bernama Yanadrn. Ia mempertanyakan menuju *new normal*, adakah sanksi tegas yang digunakan Pemda DIY untuk mendisiplinkan masyarakat. "Masih banyak yang tidak mengikuti imbauan penggunaan masker dan menjaga jarak. Pun di jalanan banyak yang tidak menggunakan masker," katanya.

Mengenai pertanyaan kedua, Sultan menjelaskan pemerintah bisa saja menutup area publik atau simpul-simpul keramaian apabila masyarakat belum bisa menyadari pentingnya menerapkan protokol kesehatan seperti memakai masker di area publik, tidak membuat kerumunan atau ikut dalam kerumunan.

Namun, ia memandang kesadaran masyarakat adalah fondasi utama dalam implementasi *new normal*. Tanpa adanya hal itu, potensi menuju *new normal* akan semakin berat. "Mari belajar hidup dengan tepa selira, saling menghargai satu sama lain, saling menjaga

satu sama lain. Kepedulian sosial sangat dibutuhkan saat ini," ungkapnya.

Ia mengingatkan kembali jika orang tanpa gejala (OTG) yang tidak menerapkan protokol kesehatan, dengan tidak mengenakan masker, misalnya, berpeluang 70% untuk menularkan virus ke orang lain. Namun apabila dia menggunakan masker, angka presentase kemungkinan menularkan tinggal 5%. Ini menunjukkan risiko mengabaikan protokol kesehatan sangat besar bagi diri sendiri dan orang lain.

"Saya sudah meminta agar pengawasan titik keramaian diperketat. Kalau masyarakat masih belum bisa menerapkan protokol kesehatan pribadi, maka implementasi *new normal* akan semakin sulit pula," ujarnya.

Akun Sulkan menanyakan tentang kesiapan industri wisata pada *new normal*. Ia merupakan salah satu pekerja dalam industri pariwisata. "Apakah sudah matang persiapannya sesuai protokol kesehatan?" ujarnya.

Menurutnya industri pariwisata adalah sektor yang rentan pada penularan virus mengingat pengunjung bisa saja datang dari zona merah. Para pekerja menurutnya juga berhak mendapat jaminan keamanan dengan dilengkapi peralatan memadai.

Sultan menuturkan saat ini pemerintah telah menyiapkan beberapa protokol untuk kesiapan tatanan *new normal*.

"Yang jelas, saya tidak ingin tergesa-gesa menerapkan tatanan baru ini. Semua harus dipersiapkan secara matang, dan detail. Semua harus dihitung faktor risikonya," katanya.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005